

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD PADA PT BPD BALI

¹ Novia Indra Sari, ² Putu Ngurah Suyatna Yasa, ³ A.A. Gede Krisna Murti

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Email: noviaindrasari01@gmail.com

Abstract

This research aims to be able to evaluate the extent to which the implementation of various principles in the form of Good Corporate Governance at PT BPD Bali uses the ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment framework which is an evaluation tool. This research focuses on three aspects of assessment, namely, first in the form of the role of stakeholders, second in the form of disclosure, and third in the form of transparency and the responsibility of two parties, namely the board of directors and also the board of commissioners. The research method used is a qualitative approach in the form of document content analysis guided by the ACGS assessment framework, using the steps of the Miles and Huberman analysis model. This research uses secondary data in the form of documents "2023 Annual Report", "2023 Governance Implementation Report", "2023 Sustainability Report" and other information which is relevant to the scope of this research which was obtained through the PT BPD Bali website. The research results show that PT BPD Bali has implemented most of the components from these three aspects well, but there are still several components that need to be improved because these components have not been implemented by PT BPD Bali, so the value obtained has not reached the maximum value. PT BPD Bali received a final score of 62.7 out of the maximum possible score of 80. In detail, it got a score of 12.69 out of a maximum score of 15 for the Stakeholder Role Aspect, a score of 21.09 out of a maximum score of 25 for the Disclosure and Transparency Aspect, and received a score of 28.92 out of a maximum score of 40 for the Responsibility Aspect from two parties, namely the first in the form of the Directors and the second in the form of the Board of Commissioners.

Keywords: Good Corporate Governance, ASEAN Corporate Governance Scorecard, PT BPD Bali, Banking

Abstrak

Penelitian ini secara tujuan untuk bisa mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan penerapan beragam prinsip Good Corporate Governance pada PT BPD Bali dengan menggunakan kerangka penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard yang menjadi suatu alat evaluasi. Penelitian ini fokusnya di tiga aspek dari penilaian yakni, pertama berupa peran dari pemangku kepentingan, kedua berupa pengungkapan, dan ketiga berupa transparansi serta suatu tanggung jawab dari dua pihak yakni direksi dan juga dewan komisaris. Metode penelitian yang dipergunakan ialah dengan pendekatan berupa kualitatif yang berupa analisis isi dokumen berpedoman pada kerangka penilaian ACGS, dengan menggunakan langkah-langkah model analisis Miles dan Huberman. Penelitian ini mempergunakan data dengan sifat sekunder dengan berupa dokumen "Laporan Tahunan 2023", "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023", "Laporan Keberlanjutan Tahun 2023" dan Informasi lain yang secara sifat relevan dengan cakupan penelitian ini yang diperoleh

melalui situs website PT BPD Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPD Bali telah menerapkan sebagian besar komponen dari ketiga aspek tersebut dengan baik, tetapi masih ada beberapa jumlah dari komponen yang perlu untuk ditingkatkan karena komponen tersebut belum diterapkan oleh PT BPD Bali, sehingga nilai yang diperoleh belum mencapai nilai maksimal. PT BPD Bali memperoleh nilai akhir sebesar 62,7 dari nilai maksimal yang mungkin dicapai adalah 80. Dengan rincian mendapat nilai 12,69 dari nilai maksimal 15 untuk Aspek Peran Pemangku Kepentingan, nilai 21,09 dari nilai maksimal 25 untuk Aspek Pengungkapan dan Transparansi, dan mendapat nilai 28,92 dari nilai maksimal 40 untuk Aspek Tanggung Jawab dari dua pihak yakni pertama berupa Direksi dan kedua berupa Dewan Komisaris.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, ASEAN Corporate Governance Scorecard, PT BPD Bali, Perbankan*

I. PENDAHULUAN

Praktik dari tata kelola dengan sifat yang buruk sering dilakukan penandaan oleh beragam masalah seperti dewan direksi yang secara kategori tidak efektif, kontrol di internal yang sifatnya lemah, audit dengan sifat yang kurang memadai, ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya penegakan hukum (Pahlevi & Purwati, 2023). Banyak dari perusahaan yang adanya di Indonesia yang masih melakukan penerapan suatu budaya berupa tata kelola dari perusahaan perusahaan hanya sebatas untuk mematuhi tuntutan dari adanya suatu regulasi dan juga melakukan penghindaran pada sanksi, tetapi tidak menjadikan beragam prinsip tersebut untuk menjadi suatu bagian dari budaya di lingkup perusahaan (Soleha, 2024).

Pada era globalisasi saat ini, setiap negara atau wilayah industri terintegrasi bersaing untuk menciptakan dan mengembangkan wilayah ekonomi yang memiliki daya

tarik dipangsa pasar. Begitu pula dengan Kawasan di lingkup ekonomi *ASEAN*, dimana para Menteri Keuangan di beragam negara *ASEAN* sudah melakukan persetujuan atas rencana dari implementasi “*ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)*” untuk memberi suatu dorongan pada aspek pengembangan dari pasar modal yang bisa terintegrasi. Inisiatif ini searah dengan suatu upaya untuk melakukan pencapaian suatu konvergensi di beragam negara *ASEAN* pada tahun 2015 menjadi suatu komunitas di lingkup ekonomi yang kompetitif atau berdaya saing. “Salah satu hasil dari pelaksanaan *ASEAN Capital Markets Forum* adalah pengembangan Tata Kelola Perusahaan *ASEAN* yang dikenal sebagai *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, serta pemberian peringkat Tata Kelola Perusahaan terbuka di kawasan *ASEAN*” (Pahlevi & Purwati, 2023).

Tujuan dari adanya suatu penyusunan *ACGS* ialah untuk

memberi suatu peningkatan standar dari tata kelola di lingkup perusahaan serta menjadikan wilayah industri yang adanya di *ASEAN* menjadi suatu wilayah dengan tata kelola di lingkup perusahaan dengan standar yang kategorinya internasional (Soleha *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Welly (2020), terkait evaluasi kepatuhan “*Good Corporate Governance*” dihadapkan dengan *ASEAN Corporate Governance*” studi yang adanya di perusahaan yang sudah dilakukan pendaftaran di Bursa Efek Indonesia, yakni berupa “industri barang konsumsi (*consumer goods industry*)” dan industri keuangan khususnya yang adanya di bidang perbankan, yang merupakan salah satu dari sektor yang secara kategori cukup besar di Indonesia. Hal ini terbukti dari data “*IDX Fact Book 2017*”, menunjukkan hampir sejumlah 100 perusahaan dengan kategori terbuka geraknya di bidang barang untuk konsumsi dan juga perbankan. Hasil dari cakupan penelitian ini memberi suatu petunjuk bahwa perusahaan di sektor barang konsumsi dan perbankan rata-rata punya suatu nilai di bawah dari angka dalam persentase dengan besaran 50% pada beberapa cakupan komponen yang menjadi paling utama seperti “Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*)”, Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*), dan Tanggung Jawab

Direksi dan Dewan Komisaris (*Responsibilities of The Board*)”.

Masih banyak jumlah dari perusahaan di Indonesia yang belum bisa untuk sepenuhnya efektif dalam mengimplementasikan “*ASEAN Corporate Governance Scorecard*.” Hal tersebut mengingat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat ekonomi di lingkup *ASEAN*, komponen dari “*ASEAN Corporate Governance Scorecard*” sangat dibutuhkan untuk menjadi suatu alat evaluasi peruntukannya bagi beragam perusahaan di Indonesia untuk bisa melakukan pemersiapan diri bersaing di tingkat *ASEAN*. Maka dari hal itu, *ACGS* menjadi suatu aspek yang perlu segera diimplementasikan untuk menilai Tata Kelola Perusahaan sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk beradaptasi dalam menghadapi era masyarakat ekonomi *ASEAN* (Karina & Weli, 2020).

“PT Bank Pembangunan Daerah Bali” ialah suatu lembaga di lingkup keuangan yang memiliki peran penting dalam pengendalian ekonomi di Bali, yang tercermin dari kontribusinya dalam pemulihan ekonomi selama Pandemi Covid-19. Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, PT BPD Bali telah menyesuaikan penerapannya dengan ketentuan yang dilakukan pengeluaran oleh “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” menjadi suatu regulator dari perbankan yang adanya di Indonesia. OJK telah menerbitkan berbagai regulasi dan pedoman terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang wajib diikuti oleh seluruh Bank di Indonesia, termasuk PT BPD Bali.

Meskipun *ACGS* sudah diterapkan di banyak perusahaan di Indonesia, belum ada penelitian khusus yang mendalam tentang penerapan *ACGS* pada PT BPD Bali. Sebagai salah satu Bank Daerah, sangat penting bagi PT BPD Bali untuk tidak hanya berpegang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai standar penerapan dari adanya Tata Kelola di lingkup Perusahaan, tetapi juga mengadopsi beragam prinsip Tata Kelola yang adanya di lingkup Perusahaan sesuai dengan standar dalam *ACGS*. Penilaian ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik Tata Kelola yang diterapkan oleh PT BPD Bali dengan standar *ASEAN*.

Selain itu, dengan melakukan evaluasi menggunakan standar *ACGS* akan membantu PT BPD Bali dalam menilai dan memperbaiki kualitas Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan agar sejalan dengan praktik terbaik di tingkat *ASEAN*. Dengan demikian, perusahaan bisa untuk melakukan pengambilan beragam langkah dari perbaikan yang menjadi perlu untuk bisa menjaga reputasi perusahaan, melakukan pemerkuatan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif dan semakin terintegrasi di wilayah *ASEAN*.

Didasarkan dengan larang belakang yang sudah disampaikan di atas, pentingnya hal berupa penerapan

penerapan Tata Kelola yang adanya di lingkup Perusahaan yang secara kategori standarnya di tingkatan international seperti *ACGS* bagi perusahaan perbankan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan dan pertanggungjawaban maka itu, peneliti punya suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan dari Tata Kelola yang adanya di Perusahaan yang secara kategori Baik, menggunakan standar “*ASEAN Corporate Governance Scorecard*” sebagai indikator dari penilaian pada PT BPD Bali, bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* pada PT BPD Bali berdasarkan standar “*ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*”, serta komponen apa saja yang menjadi kekurangan dan perlu untuk ditingkatkan. Penelitian ini diharap bisa untuk memberi suatu rekomendasi praktis peruntukannya bagi manajemen PT BPD Bali untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan.

Hasil dari cakupan penelitian ini bisa menjadi acuan peruntukannya bagi manajemen dalam mengidentifikasi suatu kebijakan atau praktik Tata Kelola yang adanya di lingkup suatu Perusahaan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga perusahaan bisa untuk lebih kompetitif dalam segala global. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan

perumusan masalah dalam cakupan berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT BPD Bali jika dinilai berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*?
2. Komponen apa saja yang masih menjadi kekurangan dan perlu ditingkatkan oleh PT BPD Bali dalam penerapan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*?

II. TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan

Hamdani (dikutip oleh Pahlevi & Purwati, 2023) menjelaskan bahwa perspektif atau juga sudut pandang dari suatu hubungan dari keagenan ialah suatu dasar yang dipergunakan untuk melakukan suatu pemahaman berupa “Corporate Governance”, konflik berupa kepentingan antara yang menjadi pemilik dan juga yang menjadi agent terjadi sebab kemungkinan dari agent tidak selalu untuk berbuat sesuai dengan adanya kepentingan dari principal, sehingga bisa memberi suatu pemicu dari biaya keagenan atau yang dilakukan penyebutan menjadi “(agency cost)”. Salah satu yang menjadi cara untuk bisa melakukan meminimalan “agency problem” ialah dengan melaksanakan penerapan suatu mekanisme berupa “Good Corporate Governance” dalam suatu pengawasan kinerja dari perusahaan, dengan suatu harapan

agent melakukan tindakan untuk suatu kepentingan dari *stakeholder* sehingga bisa untuk melakukan pengurangan suatu asimetri pada informasi, melakukan penurunan *agency cost* dan bisa untuk memberi suatu peningkatan pada pengungkapan di perusahaan.

Good Corporate Governance atau yang dilakukan penyingkatan dan penyebutan menjadi (GCG)

Diturutkan dengan Bank Dunia, “Good Corporate Governance (GCG)” ialah sekumpulan dari pertama berupa hukum, kedua berupa peraturan, dan ketiga berupa beragam prinsip yang diharuskan untuk dipatuhi untuk memberi suatu dorongan sumber daya dari perusahaan bekerja dengan cara yang efisien, sehingga melakukan penciptaan suatu nilai dari ekonomi yang jangkanya panjang dan juga berkelanjutan peruntukannya bagi yang menjadi pemegang saham di tata masyarakat yang luas (Arofah, 2024). Tata Kelola dari Perusahaan yang kategorinya baik ialah aturan yang mengatur suatu hubungan antara yang menjadi perusahaan dan juga para pemangku dari kepentingannya, dengan suatu tujuan untuk melakukan suatu pencapaian suatu kinerja dari perusahaan yang secara kategori optimal tanpa merugikan pemangku kepentingan bisnis maupun masyarakat sekitar (Afdiyah *et al.*, 2022).

ASEAN Corporate Governance Scorecard atau yang dilakukan

peningkatan dan penyebutan menjadi (ACGS)

ACGS ialah sebuah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai transparansi informasi perusahaan kepada publik, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik tata kelola yang adanya di perusahaan dengan kategori yang baik. Metode ini dikembangkan melalui kolaborasi antara “*ASEAN Capita Market Forum (ACMF)* dan *Asian Development Bank (ADB)*” dengan tujuan meningkatkan kualitas penerapan tata Kelola yang adanya di perusahaan publik di kawasan *ASEAN*. Menurut *ADB* (dikutip oleh Panangian & Sudarma, 2022), penilaian berdasarkan *ACGS* dilakukan dalam dua tingkatan, yang dirancang untuk mencerminkan praktik tata kelola perusahaan publik secara factual di setiap negara. Level pertama mencakup sejumlah komponen evaluasi yang mengacu pada hukum, peraturan, regulasi, serta prinsip dasar tata kelola perusahaan berdasarkan panduan G20/OECD. Level pertama terdiri dari lima bagian utama dalam kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1

Komponen Penilaian Level 1 ACGS

Aspek	Jumlah Kriteria	Bobot (%)	Nilai Maks
A	21	10	10
B	15	10	10
C	13	15	15
D	32	25	25
E	65	40	40

Sumber: ADB (dikutip oleh Panangian & Sudarma, 2022)

Berikut adalah penjabaran masing-masing bagian:

- Bagian A: Hak-hak dari pihak yang menjadi Pemegang Saham
- Bagian B: Perlakuan yang Adil Kepada yang menjadi Pemegang Saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan juga Transparansi
- Tanggung Jawab dari Dewan Perusahaan.

Asian Development Bank (Pahlevi & Purwati, 2023) menyatakan bahwa terdapat tiga kategori penilaian yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan skor akhir yang dicapai dalam evaluasi ACGS, yaitu:

- Sangat Terpercaya: Nilai antara 85 hingga 100.
- Terpercaya: Nilai antara 70 hingga 84,99.
- Cukup Terpercaya: Nilai antara 55 hingga 69,99.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada “PT BPD Bali Pusat, yang bertempat di Kantor Pusat Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Denpasar, Bali”. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan berupa kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian dengan sifat yang deskriptif dan juga punya kecenderungan untuk melaksanakan suatu analisis karena berfokus pada pemahaman mendalam untuk menggali makna dan

memahami suatu fenomena. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah (Sugiyono, 2020). Data yang dipergunakan ialah data dengan kategori yang sekunder berupa Laporan Tahunan 2023, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023, Laporan Keberlanjutan Tahun 2023, dan informasi lainnya yang terdapat pada website PT BPD Bali, yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi melalui website: <https://www.bpd Bali.co.id>.

Teknik analisis data dalam cakupan penelitian ini mempergunakan *content analysis* (analisis isi) bersifat deskriptif, yang berpedoman pada kerangka penilaian *ACGS*. Dengan beragam langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi atau Klasifikasi Data
- c. Perhitungan Bobot Penilaian
- d. Penyajian Data
- e. Penarikan Kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, resmi berdiri sebagai Perusahaan Daerah pada 9 Februari 1965 didasarkan dengan “Peraturan Daerah Nomor 6/DPR.DGR/1965”, telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung sektor

UMKM di Bali. Pada tahun 2004, BPD Bali mengubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanan. Sepanjang 2023, BPD Bali memperkenalkan berbagai inovasi, seperti QRIS cross-border untuk Malaysia dan Singapura, kartu kredit berbasis GPN untuk segmen pemerintah, deposito dengan mekanisme diskonto, serta digitalisasi transaksi pemerintahan desa melalui integrasi siskuedes link dengan CMS BPD Bali.

Hasil dan Pembahasan Penerapan *ACGS* pada PT BPD Bali Periode 2023

Dalam hal penilaian pada PT BPD Bali, peneliti hanya memfokuskan pada tiga aspek penilaian, yaitu aspek “Peran Pamangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi, serta Tanggung Jawab Dewan Perusahaan, dan tidak memasukkan aspek Bonus serta Penalti”. Hasil analisis terkait penerapan *ACGS* pada PT BPD Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai Akhir *ACGS* Level 1 Pada PT BPD Bali

Aspek	Total Terpenuhi	Bobot (%)	Nilai Akhir
C	11	15	12,69
D	27	25	21,09
E	47	40	28,92
Total	85	80	62,70

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan PT BPD Bali (2023)

Berdasarkan hasil penilaian atas praktik Tata Kelola Perusahaan untuk prinsip C atau Aspek Peran Pemangku Kepentingan, PT BPD Bali telah menunjukkan penerapan berupa Tata Kelola yang adanya di Perusahaan yang cukup baik dalam aspek ini, dengan mampu memenuhi 11 dari total 13 item penilaian yang terdapat dalam aspek ini. Komponen yang belum terpenuhi yaitu item penilaian yang terdapat pada parameter C.1 dan C.3. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai dengan rumus (jumlah komponen yang dipenuhi oleh perusahaan) dibagi dengan (total komponen penilaian) kemudian dikalikan dengan (bobot), maka akan diperoleh nilai akhir seperti pada tabel diatas.

Kemudian pada aspek D atau Aspek Pengungkapan dan Transparansi, PT BPD Bali mampu memenuhi 27 item dari total keseluruhan terdapat 32 item penilaian yang tertera dalam sistem penilaian *ACGS* pada aspek ini, artinya masih terdapat 5 item penilaian yang belum dipenuhi. Selanjutnya pada Aspek Tanggung Jawab Dewan Perusahaan. PT BPD Bali telah berhasil memenuhi 47 dari 65 item penilaian pada aspek ini. Hasil ini mengartikan bahwa, walaupun belum memenuhi semua komponen penilaian pada aspek ini, tetapi Bank sudah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Tata Kelola yang adanya di

Perusahaan secara kategori Baik. Hal ini terlihat dari suatu upaya yang sudah dilaksanakan dalam melakukan penerapan beragam prinsip “*Good Corporate Governance*”, terutama pada komponen *ACGS* yang telah berhasil dipenuhi. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa walaupun belum ada regulasi yang mengharuskan PT BPD Bali menerapkan standar *ACGS* seperti pada perusahaan yang berstatus publik, tapi PT BPD Bali sudah banyak menerapkan standar dalam *ACGS* ini dengan baik.

Nilai yang diperoleh belum maksimal karena sebagai Badan Usaha Milik Daerah atau yang dilakukan penyingkatan dan penyebutan menjadi (BUMD), PT BPD Bali tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang menyeluruh atau secara detail seperti halnya perusahaan yang berstatus publik. Selain itu, karena *ACGS* sebenarnya dirancang untuk mengevaluasi perusahaan berstatus badan publik, sehingga beberapa komponen di dalamnya memang kurang relevan untuk perusahaan yang berbentuk BUMD seperti PT BPD Bali.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam suatu upaya bisa melakukan penerapan “*Good Corporate Governance*”, PT BPD Bali acuannya dengan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum”, dan sudah

melakukan *Self Assessment* yang menunjukkan hasil yang baik yaitu peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik”. Selanjutnya berdasarkan analisis lebih lanjut dengan menggunakan tiga Aspek penilaian dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, yaitu “Aspek Peran Pemangku Kepentingan, Aspek Pengungkapan dan Transparansi, serta Aspek Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT BPD Bali sudah menerapkan sebagian besar komponen dalam ketiga aspek tersebut dengan baik. Namun, nilai yang diperoleh belum mencapai nilai maksimal karena PT BPD Bali belum sepenuhnya memenuhi seluruh komponen yang terdapat dalam ketiga aspek ACGS tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi PT BPD Bali memperoleh nilai akhir sebesar 62,7 dari nilai maksimal yang mungkin dicapai terhadap ketiga aspek ini adalah 80. Dengan rincian mendapat nilai 12,69 dari nilai maksimal 15 untuk Aspek Peran Pemangku Kepentingan, nilai 21,09 dari nilai maksimal 25 untuk Aspek Pengungkapan dan Transparansi, dan nilai 28,92 dari nilai maksimal 40 untuk Aspek Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Nilai tersebut belum maksimal karena sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPD Bali tidak memiliki kewajiban untuk

mengungkapkan informasi yang menyeluruh atau secara detail seperti halnya perusahaan yang berstatus publik.

2. PT BPD Bali masih memiliki ruang perbaikan dalam penerapan ACGS, terutama pada beberapa parameter pada setiap aspek yang belum terpenuhi. Pada Aspek Peran Pemangku Kepentingan, perusahaan belum mengungkapkan perlindungan mengenai hak-hak kreditur, kebijakan kompensasi berbasis kinerja, serta program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen. Pada Aspek Pengungkapan dan Transparansi, informasi mengenai kehadiran direksi dan komisaris dalam rapat, serta risalah RUPS, belum diungkapkan secara detail pada laporan tahunan maupun situs website perusahaan. Sementara itu, pada Aspek Tanggung Jawab Dewan Perusahaan, terdapat kekurangan dalam komposisi komite remunerasi dan nominasi, transparansi kriteria dan proses pemilihan direksi dan dewan komisaris, penyesuaian remunerasi berbasis kinerja, serta pengungkapan terkait program orientasi dan evaluasi kinerja direksi, komisaris, dan komite terkait.

Implikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menggunakan kerangka penilaian *ASEAN Corporate*

Governance Scorecard (ACGS) sebagai alat evaluasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana peran *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* sebagai indikator dalam melakukan penilaian *Good Corporate Governance (GCG)* pada perusahaan di wilayah *ASEAN*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada manajemen PT BPD Bali untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam mengidentifikasi kebijakan atau praktik Tata Kelola Perusahaan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif dalam segala global.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari dalam penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan waktu dan sumber informasi, serta keterbatasan dalam hal pengambilan objek yang hanya menggunakan satu perusahaan. Selain itu, dalam penelitian ini tidak dilakukan wawancara dengan seluruh pemangku kepentingan PT BPD Bali dan hanya menggunakan data sekunder. Penilaian ini di analisis berdasarkan dokumen-dokumen seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dan Informasi lain yang terdapat dalam situs web PT BPD Bali.

Saran

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan PT BPD Bali disarankan untuk tidak hanya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tetapi juga menerapkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* sebagai alat evaluasi tambahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penggunaan *ACGS* sebagai acuan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan dapat membantu Bank dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan atau efektivitas dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan demikian Bank dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan sehingga tidak hanya mematuhi standar POJK tetapi juga mencapai standar Tata Kelola Perusahaan yang diakui secara internasional. Penerapan prinsip-prinsip dalam *ACGS* ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing Bank di pasar internasional dan mendukung upaya dalam mewujudkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan menganalisis dokumen dan

informasi perusahaan dari tahun sebelumnya atau setelahnya. Sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan di setiap tahunnya, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perkembangan Tata Kelola Perusahaan dari waktu ke waktu.

3. Di samping itu, peneliti ini tidak menggunakan metode wawancara sebagai sumber informasi tambahan. Oleh sebab itu, disarankan untuk peneliti di masa mendatang agar menambahkan metode wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, baik dari pihak internal perusahaan maupun pihak pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Karina, J., & Weli, W. (2020). Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ajar*, 3(01), 114–132.
<https://doi.org/10.35129/ajar.v3i01.109>
- Pahlevi, R., & Purwati, L. (2023). Analisis Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University*.
- Panangian, A. A. G., & Sudarma, M. (2022). Analisis Implementasi Kriteria Asean Corporate Governance Scorecard pada Pt. Lippo Karawaci, Tbk. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 1(1), 110–121.
- Soleha, R. A., Oktavia, R., Dewi, F. G., & Widiyanti, A. (2024). Analisis Penerapan Asean Corporate Governance Scorecard Pada Perusahaan Perbankan : Komparasi Perusahaan Perbankan Di ASEAN Berpredikat Asean Asset Class. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 122–134.
- Sugiari, L. P. (2021). *Kinerja BPD Bali di Masa Pandemi, Aset Tumbuh 6,34 Persen*. Bali Bisnis.Com.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sutikno, S. E. (2023). *Manajemen Risiko Subtansi dan Fundamental*. PT RajaGrafindo Persada.